



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1096, 2020

KEMENDAG. Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses
Arsip Dinamis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk pengamanan dan pengaksesan arsip dinamis, perlu mengatur Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hokum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
4. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta fungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip Dinamis.
7. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
8. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, dan Pengamanan Arsip Dinamis di Kementerian Perdagangan.
9. Pencipta Arsip adalah Kementerian Perdagangan.
10. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
11. Unit Kerja adalah satuan organisasi di Kementerian Perdagangan.
12. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

13. Pejabat Fungsional Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis di Kementerian Perdagangan.
14. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
15. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, dan apabila informasi yang terdapat dalam Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian terhadap *privacy*, serta kerusakan kemitraan dan reputasi.
19. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
20. Pengguna Internal adalah pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Perdagangan.
21. Pengguna Eksternal adalah pihak yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Perdagangan.

22. Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif adalah rekaman kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.
23. Arsip Dinamis Fungsi Substantif adalah rekaman kegiatan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dan bersifat operasional.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Pengamanan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan bagian dari tata kearsipan di Kementerian Perdagangan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan
 - b. desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - b. memberikan pedoman kepada Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kerja dalam:

1. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis secara tertib;
 2. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 3. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat terjaga; dan
 4. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:
- a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - b. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh Publik; dan
 - c. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

BAB III

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis mengacu pada kebijakan Klasifikasi Arsip dengan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi unit kerja dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

(3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Klasifikasi Arsip berdasarkan fungsi fasilitatif:

- 1) HM : Hubungan Masyarakat
- 2) HK : Hukum
- 3) KP : Kepegawaian
- 4) KU : Keuangan
- 5) TU : Ketatausahaan
- 6) OT : Organisasi dan Tata Laksana
- 7) PL : Perlengkapan
- 8) PR : Perencanaan
- 9) RT : Kerumahtanggaan
- 10) PW : Pengawasan
- 11) DL : Pendidikan dan Pelatihan
- 12) PP : Penelitian dan Pengembangan
- 13) TI : Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Klasifikasi Arsip berdasarkan fungsi Substantif:

- 1) BU : Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 2) DN : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 3) SL : Sarana Distribusi dan Logistik
- 4) BP : Bahan Pokok dan Barang Penting
- 5) EP : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
- 6) IP : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- 7) IM : Impor
- 8) EI : Fasilitasi Ekspor Impor
- 9) PP : Pengamanan Perdagangan
- 10) SM : Standardisasi dan Pengendalian Mutu
- 11) PK : Pemberdayaan Konsumen
- 12) BJ : Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- 13) MR : Metrologi
- 14) TN : Tertib Niaga
- 15) PM : Perundingan Multilateral
- 16) PA : Perundingan Asean
- 17) AO : Apec dan Organisasi Internasional

- 18) PB : Perundingan Bilateral
- 19) PJ : Perundingan Perdagangan dan Jasa
- 20) IE : Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
- 21) PE : Pengembangan Produk Ekspor
- 22) KP : Kerjasama Pengembangan Ekspor
- 23) PC : Pengembangan Promosi dan Citra
- 24) DE : Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
- 25) UD : Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
- 26) PF : Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
- 27) BP : Pembinaan dan Pengembangan Pasar
- 28) PR : Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
- 29) AD : Komite Anti Dumping Indonesia
- 30) PI : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Kementerian Perdagangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; atau
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. teknis pengamanan; dan
 - b. pengaturan akses.

Pasal 7

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 8

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri;
 - c. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
 - d. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur;
 - e. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf; dan
 - f. Pengawas Internal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada di Kementerian Perdagangan.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang:
 - a. mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya; dan
 - b. tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakses Arsip yang berada di luar kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (5) Pejabat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
- (6) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian Perdagangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengawas internal dalam mengakses seluruh Arsip di Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan/atau Unit Kerja.

Pasal 9

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. Publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian Perdagangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Eksternal dalam mengakses seluruh Arsip di Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan/atau Unit Kerja.
- (4) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian Perdagangan yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (5) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian Perdagangan yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Arsip Dinamis di Kementerian Perdagangan terdiri atas Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif dan Arsip Dinamis Fungsi Substantif.
- (2) Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi

Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Arsip Dinamis Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip Konvensional, berupa:
 1. lemari Arsip (*filing cabinet*) untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
 2. brankas/lemari besi untuk menyimpan Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia,
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana, berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daftar Arsip; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip.
- (4) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa:
 - a. kamera pengawas (*closed circuit television*);

- b. kunci pengamanan ruangan;
- c. tabung pemadam kebakaran; dan/atau
- d. media simpan Arsip.

Pasal 12

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai pelaksana Arsip.
- (2) Staf lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan arsip dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala Biro Umum.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah berhalangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Unit Pengolah dapat menugaskan staf pengganti sebagai pelaksana Arsip.
- (4) Staf pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Biro Umum.
- (3) Pelaksana Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

**KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP
 FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
I. HUBUNGAN MASYARAKAT						
1	HM.00	Penerangan dan Publikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers (press realese), media massa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2	HM.01	Dengar pendapat (hearing) Dewan Perwakilan Rakyat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat (hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan, Biro Humas
3	HM.02	Hubungan Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.00	Lembaga Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/ Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.01	Organisasi Perdagangan Nasional Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan nasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi, dan Pelaku Usaha.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.02	Organisasi Perdagangan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Biro Hubungan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan Internasional antara lain <i>Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)</i> , <i>World Trade Organization (WTO)</i> , dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).			kinerja Kementerian Perdagangan	Masyarakat
	HM.02.03	Perusahaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.04	Organisasi Kemasyarakatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.02.05	Perguruan Tinggi atau Sekolah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Lembaga dengan perguruan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		tinggi atau sekolah, termasuk orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).				
	HM.02.06	Bakohumas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
4	HM.03	Keprotokolian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	HM.03.00	Upacara atau Acara Kedinasan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokolier termasuk upacara bendera, upacara hari besar, Upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
	HM.03.01	Kunjungan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	HM.03.02	Agenda Pimpinan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum, Biro Humas
5	HM.04	Dokumentasi dan Penerbitan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin, majalah, jurnal, atau naskah sumber, yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
6	HM.05	Penghargaan atau Tanda Kenang-kenangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
7	HM.06	Ucapan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Biro Hubungan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.			kinerja Kementerian Perdagangan	Masyarakat
8	HM.07	Dokumen Hosting Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan <i>website</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
II.HUKUM						
1	HK.00	Program Legislasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Perdagangan maupun program legislasi nasional.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
2	HK.01	Produk Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.01.00	Produk Hukum yang bersifat Pengaturan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		mengatur seperti Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap) atau Standard Operasional Procedure, Surat Edaran di bidang perdagangan yang meliputi tahapan persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian , perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.				
	HK.01.01	Produk Hukum yang bersifat Penetapan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan sejak awal proses hingga penandatanganan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
3	HK.02	Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	HK.02.00	Kerjasama Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.	Terbatas	Eselon II	mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.02.01	Kerjasama Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
4	HK.03	Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	HK.03.00	Bantuan Hukum Kasus Perdata Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang perdagangan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.03.01	Bantuan Hukum Kasus Pidana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang perdagangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.03.02	Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang perdagangan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.03.03	Advokasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pemberian pelayanan Advokasi hukum dalam kasus hukum di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	
5	HK.04	Telaah Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.04.00	Telaah Hukum Internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
	HK.04.01	Telaah Hukum Eksternal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
6	HK.05	Sosialisasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
7	HK.06	Dokumentasi Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, penyebarluasan, dan penyebaran informasi hukum.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Hukum
8	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah sampai dengan penyelesaian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.	Rahasia	Eselon I	Memiliki dampak yang dapat merusak kemitraan, kepercayaan dan reputasi antar instansi	Biro Hukum
9	HK.08	Kasus Hukum Naskah yang berkaitan dengan kasus hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Biro Hukum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum peradilan tata usaha oleh Kementerian Perdagangan.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	
III. KEPEGAWAIAN						
1	KP.00	Formasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaaan calon pegawai negeri sipil, yang meliputi pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, rencana penempatan pegawai, rencana penetapan klasifikasi pendidikan, dan persetujuan formasi.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
2	KP.01	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.01.00	Penerimaan Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, yang meliputi pengumuman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penerimaan, penerimaan lamaran, pemanggilan, ujian, dan pengumuman akhir penerimaan pegawai.				
	KP.01.01	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.01.02	Prajabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.01.03	Prajabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		evaluasi pendidikan prajabatan.			Kementerian Perdagangan	
3	KP.02	Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.02.00	Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.02.01	Ujian Dinas Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.02.02	Ujian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Biro Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.			yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	dan Kepegawaian
4	KP.03	Mutasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.03.00	Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat / golongan Pegawai Negeri Sipil.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.03.01	Kenaikan Gaji Berkala Naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.03.02	Penyesuaian Masa Kerja Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.03.03	Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.03.04	Promosi Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.03.05	Rotasi Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Biro Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.			yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	dan Kepegawaian
	KP.03.06	Alih Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas antara lain mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, dan pegawai yang diperbantukan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5	KP.04	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.04.00	Pengangkatan Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk pelantikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		jabatan.			Perdagangan	
	KP.04.01	Pemberhentian Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural atau jabatan fungsional.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6	KP.05	Pendelegasian Wewenang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.05.00	Pelaksana Tugas (Plt) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.05.01	Pelaksana Harian (Plh) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).				
7	KP.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.06.00	Program Diploma Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Diploma.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.06.01	Program Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Sarjana.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.06.02	Program Pasca Sarjana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Biro Organisasi dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan Pasca Sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana			Perdagangan	Kepegawaian
	KP.06.03	Program Doktorat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Doktorat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktorat.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.06.04	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.06.05	Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional.				
	KP.06,06	Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Teknis Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
8	KP.07	Administrasi Pegawai	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.07.00	Data dan Keterangan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.07.01	Kartu Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.07.02	Kartu Istri dan Kartu Suami	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan	Biro Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).			kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	dan Kepegawaian
	KP.07.03	Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.07.04	Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Naskah yang berkaitan dengan pengurusan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		BPJS.			privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
	KP.07.05	Tanda Jasa Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian
9	KP.08	Pembinaan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KP.08.00	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.08.01	Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.08.02	Pembinaan Mental Naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk ceramah keagamaan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.08.03	Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi teguran lisan, teguran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/ golongan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.			Kementerian Perdagangan	
10	KP.09	Pembinaan Jabatan Fungsional	Biasa/ Terbuca	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.00	Jabatan Fungsional Arsiparis Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, meliputi pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.01	Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Naskah yang berkaitan dengan jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Biro Organisasi dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		fungsiional Analisis Kepegawaian, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsiional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Kepegawaian
	KP.09.02	Jabatan Fungsiional Widyaaiswara Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsiional Widyaaiswara, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsiional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.03	Jabatan Fungsiional Peneliti Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsiional Peneliti, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsiional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.04	Jabatan Fungsiional Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Biro Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perencanaan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.			yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	dapat dan Kepegawaian
	KP.09.05	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.06	Jabatan Fungsional Auditor Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Auditor, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kredit, dan pemberian tunjangan jabatan				
	KP.09.07	Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pustakawan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.08	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.09	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.				
	KP.09.10	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis perdagangan meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.09.11	Jabatan Fungsional Lainnya Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
11	KP.10 KP.10.00	Kesejahteraan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Biro Organisasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, <i>general check up</i> pejabat.			yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	dan Kepegawaian
	KP.10.01	Cuti Naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.10.02	Rekreasi, Kesenian, dan Olah Raga Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olah raga.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.10.03	Bantuan Sosial Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		musibah termasuk bantuan sosial yang diberikan oleh dan/atau kepada pihak lain, dan sumbangan-sumbangan lainnya			Perdagangan	
	KP.10.04	Perumahan Naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
12	KP.11	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil				
	KP.11.00	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dengan hak pensiun, yang meliputi proses pengajuan permohonan sampai dengan dictapkannya keputusan pensiun termasuk pensiun/duda/janda/anak dan Taspem.				
	KP.11.01	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, meliputi proses pengajuan, proses pemberhentian sampai ditetapkan keputusannya pemberhentian pegawai.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
13	KP.12	Organisasi Non Kedinasaan				
	KP.12.00	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.12.01	Dharma Wanita Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Perdagangan.				
	KP.12.02	Koperasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.12.03	Yayasan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	KP.12.04	Organisasi Lainnya Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
IV. KEUANGAN						
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.00.00	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan DIPA, POK, dan revisi DIPA/POK.			Kementerian Perdagangan	
	KU.00.01	Rencana Anggaran Belanja (RAB) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.00.02	Penggajian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.00.03	Pengeluaran Anggaran Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP-TUP), Surat Kuasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/ mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bahan Nota Keuangan.				
2	KU.01	Pengelolaan Perbendaharaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.00	Perbendaharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara penerimaan.				
	KU.01.01	Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.02	Kartu Pengawasan Kredit Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.03	Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).			Kementerian Perdagangan	
	KU.01.04	Penerimaan Non Pajak Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penysetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.05	Pengembalian Belanja Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, pengembalian belanja barang, dan pengembalian belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.06	Tagihan Penerimaan Negara Naskah yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pendapatan maupun pengembalian belanja melalui Bukti	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).			Perdagangan	
	KU.01.07	Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.08	Verifikasi Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.01.09	Pembukaan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP),	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran.			Perdagangan	
3	KU.02	Perhitungan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
4	KU.03	Ketatausahaan Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.03.00	Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.03.01	Surat Keterangan Pembayaran (SKPP) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).			Kementerian Perdagangan	
	KU.03.02	Permohonan Pinjaman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
	KU.03.03	Iuran Keanggotaan Organisasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
V. KETATAUSAHAAN						
1	TU.00	Peraturan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.				
	TU.00.00	Pengurusan Surat Masuk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pegurusan surat masuk.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.00.01	Pengurusan Surat Keluar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pegurusan surat keluar.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
2	TU.01	Pengandaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
3	TU.02	Kearsipan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Kearsipan dinamis di lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Kementerian Perdagangan.				
	TU.02.00	Pembinaan Kearsipan (Internal) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi fungsional arsiparis.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.01	Penyusunan Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.02	Penggunaan Arsip Aktif Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Arsip, seperti daftar Arsip Aktif, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.03	Peminjaman Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pemindahan Arsip.			Perdagangan	
	TU.02.04	Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan Arsip.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.05	Penyerahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.06	Layanan Arsip Inaktif Naskah yang berkaitan dengan layanan Arsip Inaktif seperti daftar Arsip Inaktif, peminjaman Arsip, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.07	Pemeliharaan/Perawatan Arsip Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan arsip.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	TU.02.08	Program Arsip Terjaga Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program arsip terjaga.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4	TU.03.	Rapat, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis Naskah yang berkaitan dengan rapat, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat kerja teknis internal Kementerian Perdagangan, notulen, dan hasil pembahasannya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Penanganan Isu Strategis
5	TU.04	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri termasuk pengurusan passport, visa, exit permit, sampai dengan laporan perjalanan dinas.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
VI. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
1	OT.00	Organisasi Naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2	OT.01	Uraian Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
3	OT.02	Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
4	OT.03	Mekanisme Kerja Naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan Standard Operasional Procedures (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5	OT.04	Ketatalaksanaan Naskah yang berkaitan dengan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Biro Organisasi dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.			Perdagangan	Kepegawaian
VII. PERLENGKAPAN						
1	PL.00	Perencanaan Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan usulan dan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolannya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
2	PL.01	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	PL.01.00	Perlengkapan Kantor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah terima.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PL.01.01	Peralatan Kantor Naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	PL.01.02	Tanah dan Bangunan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/ kekayaan (sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	PL.01.03	Jasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	PL.01.04	Kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.			kinerja Kementerian Perdagangan	
	PL.01.05	Instalasi/Jaringan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, <i>Local Area Network (LAN)</i> , dan sebagainya dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	PL.01.06	Peralatan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan perdagangan seperti perangkat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTIP) mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
3	PL.02	Penggunaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan barang milik negara.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
4	PL.03	Pemanfaatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan barang milik negara mulai dari proses awal usulan sampai terbit izin pemanfaatan dan kontrak antar pihak.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
5	PL.04	Distribusi dan Penyimpanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang milik negara dari gudang serta pendistribusiannya untuk kepentingan intern maupun ekstern.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
6	PL.05	Peminadantanganan, Penghapusan, dan Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan mulai dari proses awal usulan hingga terbitnya Berita Acara dan Surat Keputusan.				
7	PL.06	Penatausahaan dan Inventarisasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan maupun inventarisasi barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti Laporan Persediaan, Laporan barang milik negara, dan Laporan Inventarisasi barang milik negara.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan
8	PL.07	Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penetapan kebijakan barang milik negara baik kebijakan umum dan teknis serta kegiatan yang bersifat penerbitan dan pemantauan/investigasi.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Keuangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
VIII. PERENCANAAN						
1	PR.00	Usulan Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
2	PR.01	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.01.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
3	PR.02	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak	Biro

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PR.02.00	Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Perdagangan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.02.01	Perjanjian Kinerja Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan	Rahasia	Eselon I	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Biro Perencanaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Presiden dan Menteri Koordinator.				
4	PR.03	Penyusunan Rencana Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Perdagangan Naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Perdagangan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Standar Biaya Khusus (SBK).	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.03.01	Revisi Dokumen Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak	Biro

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berhubungan dengan revisi/ perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan PO.			yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Perencanaan
5	PR.04	Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.04.00	Laporan Berkala Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Kementerian Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.04.01	Laporan Khusus Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, yang meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.				
	PR.04.02	Progress Report Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
	PR.04.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.				
	PR.04.05	Evaluasi Kegiatan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan
IX. KERUMAHAN TANGGAAN						
1	RT.00	Fasilitas Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	RT.00.00	Kendaraan Dinas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, dan laporan kehilangan kendaraan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	RT.00.01	Ruang Rapat dan Konsumsi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.			Perdagangan	
	RT.00.02	Telekomunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
	RT.00.03	Rumah Jabatan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah jabatan seperti perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan rumah jabatan dan pengamanannya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
2	RT.01	Tata Ruang Naskah yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruangan baik ruang kerja maupun ruang publik.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
3	RT.02	Pemeliharaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.				
4	RT.03	Pengamanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantorseperti daftar piket satpam/ security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Perdagangan dan pengaturan perpajakan termasuk kartu parkir	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Umum
X. PENGAWASAN						
1	PW.00	Audit Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspektorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dengan laporan.				
2	PW.01	Review Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal
3	PW.02	Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal
4	PW.03	Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Inspertorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PW.03.00	Internal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari internal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.	Terbatas	Eselon II	Perdagangan Memiliki dampak dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorot Jenderal
	PW.03.01	Eksternal Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorot Jenderal
5	PW.04	Pengawasan Melekat Naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorot Jenderal
6	PW.05	Laporan Hasil Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak dapat	Inspertorot Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan dan tahunan, yang meliputi ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	
7	PW.06	Pemantauan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Inspertorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PW.06.00	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan/program dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.	Terbatas	Eselon II	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal
	PW.06.01	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) meliputi Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Keputusan penghapusan uang	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemaman Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan barang, dan laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR).				
	PW.06.02	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TILHP) Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal
	PW.06.03	Penerapan Early Warning System Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspertorat Jenderal
	PW.06.04	Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Inspertorat Jenderal

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan.			mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	
8	PW.07	Kegiatan pengawasan lainnya Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Inspektorat Jenderal
XI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	DL.00	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.00.00	Perencanaan Kebutuhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Pusat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pendidikan dan Pelatihan
	DL.00.01	Sistem dan Metode Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.00.02	Kurikulum/Silabus Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.00.03	Bahan Ajar/Modul	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Pusat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan perdagangan.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pendidikan dan Pelatihan
	DL.00.04	Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2	DL.01	Penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.01.00	Pendidikan dan pelatihan Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait teknis bidang Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.01.01	Pendidikan dan pelatihan non teknis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Pusat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait non teknis bidang Perdagangan.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pendidikan dan Pelatihan
	DL.01.02	Teknis Pimpinan Lembaga/Unit Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perdagangan bagi pimpinan lembaga perdagangan dan pimpinan unit perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	DL.01.03	Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan evaluasi setelah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3	DL.02	Database Tenaga Pengajar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database tenaga pengajar perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4	DL.03	Database Alumni Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database alumni pendidikan dan pelatihan perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
XII. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	PP.00	Pengkajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
	PP.00.00	Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PP.00.01	Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perdagangan yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Eselon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
	PP.00.02	Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya manusia perdagangan baik yang berada di unit pencipta Arsip maupun lembaga perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, <i>study referensi</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Eselon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.				
	PP.00.03	Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, <i>study referensi</i> , penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ <i>survey</i> , analisis data, pembahasan hasil <i>survey</i> , penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Eselon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
2	PP.01	Pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PP.01.00	Sistem Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang berupa penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perdagangan	Perdagangan Esclon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
	PP.01.01	Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma,	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Esclon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.			Perdagangan	Pengembangan Perdagangan
	PP.01.02	Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Eselon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PP.01.03	Sarana Prasarana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, <i>study referensi</i> , penyusunan kuisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Eselon II di Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
3	PP.02	Diseminasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajian dan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
4	PP.03	Publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Badan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan melalui Jurnal/ Bunga Rampai/ Leaflet/ Warta yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses review, proses editing, pembuatan dummy, pencetakan, dan pendistribusian.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
5	PP.04	Seminar/Call of Paper/Bedah Naskah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pengelolaan publikasi jurnal/bunga rampai yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
XIII. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
1	TI.00	Kebijakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penyusunan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi serta data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.				
2	TI.01	Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.01.00	Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan komunikasi meliputi masterplan dan roadmap teknologi informasi dan komunikasi serta indikator kinerja teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.			Perdagangan	
	TI.01.01	Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (infrastruktur), antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan,	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain				
	TI.01.02	Perencanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi risk assessment dan rencana tindakan penanganan risiko, antara lain berupa naskah peraturan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TI.01.03	Perencanaan Manajemen Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi analisis cost benefit, evaluasi investasi dan risikonya, serta penentuan prioritas investasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.01.04	Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen data dan informasi meliputi analisis kebutuhan data dan informasi, serta penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan data dan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.				
3	TI.02	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.02.00	Pengembangan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan infrastruktur, dan lain-lain.	Rahasia	Eselon I	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TI.02.01	Pengembangan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan aplikasi, antara lain berupa naskah peruratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan aplikasi, dan lain-lain.	Rahasia	Eselon I	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.02.02	Pengembangan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan basis data, antara lain berupa naskah peruratan, surat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Kemanaan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan basis data, dan lain-lain.				
	TI.02.03	Pengembangan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan data dan informasi, dan lain-lain.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
4	TI.03	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	TI.03.00	Pengelolaan Infrastruktur Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan infrastruktur, dan lain-lain.	Rahasia	Eselon I	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.03.01	Pengelolaan Aplikasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan aplikasi, antara lain berupa	Rahasia	Eselon I	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan aplikasi, dan lain-lain.				
	TI.03.02	Pengelolaan Basis Data Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan basis data, dan lain-lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	TI.03.03	Pengelolaan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Pusat Data dan Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		<p>pengelolaan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan data dan informasi, dan lain-lain.</p>				
	TI.03.04	<p>Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta help desk-nya seperti layanan email, wifi,</p>	Terbatas	Eselon III	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan</p>	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		troubleshoot, pembuatan subdomain, dan penempatan server, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain				
	TI.03.05	Layanan Data dan Informasi Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan data dan 1 informasi beserta help desk-nya, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan data dan informasi, dan lain-lain.				

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

**KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP
 SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
XIV. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
I. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI						
1	BU.00	Kelembagaan dan Penguatan Usaha				
	BU.00.00	Kelembagaan Kelenbagaan Naskah yang berkaitan dengan perizinan, pendampingan, dan kegiatan pameran pelaku usaha.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
	BU.00.01	Penguatan Usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat Bina

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan rekomendasi kegiatan (survei, pengawasan, berita acara survei, laporan) terkait waralaba, penjualan langsung, dan rekomendasi pameran untuk penguatan usaha.			kinerja Kementerian Perdagangan	Usaha Dan Pelaku Distribusi
2	BU.01	Jasa Perdagangan				
	BU.01.00	Perdagangan berbasis elektronik Naskah yang berkaitan dengan <i>e-commerce</i> , rapat inter/antar Kementerian, uji publik, pendaftaran <i>e-commerce</i> , aplikasi <i>e-commerce</i> serta <i>workshop</i> berkaitan perdagangan berbasis elektronik.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
	BU.01.01	Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis Naskah yang berkaitan dengan perizinan (jasa survei dan broker properti), dan sosialisasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	BU.01.02	Data dan Informasi Perizinan Naskah yang berkaitan dengan perizinan (<i>e-commerce</i> , jasa informasi dan bisnis) dan kegiatan partisipasi penyusunan kebijakan internasional.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3	BU.02	Usaha Dagang Asing dan Keagenan				
	BU.02.00	Usaha Dagang Asing Naskah Laporan tembusan Penerbitan Perwakilan Perusahaan Asing (PPPA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap 6 bulan sekali yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA), Perwakilan Perusahaan Asing (PPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
	BU.02.01	Keagenan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat Bina

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan perizinan agen, agen tunggal, sub agen, distributor, sub distributor, distributor tunggal, jasa (dalam negeri, luar negeri) meliputi permohonan, persyaratan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran, analisa sampai dengan terbitnya surat izin.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Usaha Dan Pelaku Distribusi
4	BU.03	Informasi Perusahaan.				
	BU.03.00	Pendaftaran Perusahaan Naskah yang berkaitan dengan laporan penerbitan surat izin usaha perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan), identifikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO), implementasi dan pemantauannya serta bimtek SIUP/TDP, dan juga perizinan manual kartu garansi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
	BU.03.00	Analisa Laporan Keuangan Tahunan	Terbatas	Eselon III		Direktorat Bina

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Perusahaan Naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), database LKTP, termasuk data layanan LKTP kepada masyarakat dan perusahaan.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Usaha Dan Pelaku Distribusi
5	BU.04	Pelaku Pasar				
	BU.04.00	Penggecer Naskah yang berkaitan dengan forum komunikasi serta kegiatan sosialisasi kebijakan Toko Modern. sumber, yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
	BU.04.01	Pemasok Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan usaha Toko Modern. Pengawasan Barang dan Jasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang dan jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dibidang Sistem dan Pengawasan Distribusi Langsung dan Waralaba, Distribusi Tidak Langsung, Jasa Perdagangan, Distribusi dan Bisnis, Perdagangan berbasis Elektronik.				
II. PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
1	DN.00	Iklim Usaha				
	DN.00.00	Iklim Usaha Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan/pedoman bagi Usaha Kecil Menengah seperti pelaksanaan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> sampai dengan konsep rancangan Peraturan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.00.00	Bimbingan Teknis Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/teknis tentang pengembangan pemasaran, kemasan, dan pendampingan serta fasilitasi antara lain berkaitan dengan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pengelolaan keuangan bagi usaha kecil dan menengah, dari surat pemberitahuan sampai dengan laporan kegiatan.			Perdagangan	
2	DN.01	Fasilitas Usaha dan Pemasaran				
	DN.01.00	Fasilitas Usaha Produktif Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitas usaha produktif, serta surat persetujuan pemberian bantuan sarana usaha perdagangan dalam bentuk barang yang meliputi: gerobak, tenda, packaging, fasilitas halal, Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan fasilitas usaha produktif melalui kegiatan serta fasilitas usaha produktif melalui proposal dinas.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.01.01	Pemasaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bentuk online dan pemasaran dalam bentuk konvensional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		seperti kemiripan dan partisipasi pameran, kerjasama pameran dengan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi pameran dan pameran Produk Unggulan Daerah serta kerjasama dengan toko/ retail modern.			Kementerian Perdagangan	Negeri
3	DN.02	Pengembangan Produk Lokal				
	DN.02.00	Penelaah Potensi Produk Naskah yang berkaitan dengan identifikasi produk unggulan daerah seperti permohonan data ke dinas daerah sampai dengan profil produk.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.02.01	Database Usaha Mikro dan Menengah Naskah yang berkaitan dengan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Kementerian Perdagangan dalam bentuk etalase Produk Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					Perdagangan	
4	DN.03	Pencitraan Produk Dalam Negeri				
	DN.03.00	Kerjasama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Aku Cinta Indonesia dengan sekolah dan pelaku usaha dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada anak didik dan generasi muda/masyarakat dan surat pemberitahuan kegiatan sampai dengan laporan kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	DN.03.01	Peningkatan Promosi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti televisi/Placement, Merchandise, Kampanye Melalui Media Sosial/Periklanan di televisinasional, Kampanye Cinta Produk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Indonesia yang mencakup Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Budaya, Hari Pakai Produk, Pemetaan Pola Konsumsi.				
III. SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK						
1	SL.00	Pengembangan Sarana Distribusi				
	SL.00.00	Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pasar rakyat, penyampaian proposal, review proposal, sampai disetujuinya pasar rakyat.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
	SL.00.01	Identifikasi Sarana Distribusi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi Sarana Distribusi, baik dari pengajuan, pengecekan lapangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
	SL.01	Pengelolaan Sarana Distribusi				
	SL.01.00	Evaluasi Pengelolaan Naskah yang berkaitan dengan survei,	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Direktorat Sarana

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar rakyat termasuk sekolah pasar, aktivasi pasar rakyat.			Perdagangan	Distribusi dan Logistik
2	SL.02	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik				
	SL.02.00	Pemerintah Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah guna terlaksananya kelancaran arus logistik antar provinsi, terluar, dan perbatasan serta konektivitas sektor perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
	SL.02.01	Informasi Logistik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan survei, monitoring, dan informasi sarana distribusi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
IV. BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
1	BP.00	Barang Kebutuhan Pokok				
	BP.00.00	Hasil Pertanian dan Peternakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Bahan Pokok dan Barang Penting
	BP.00.01	Hasil Industri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi gula, minyak goreng, terigu.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Penting
	BP.00.02	Hasil Perikanan Kelautan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Bahan Pokok

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol dan ikan cakalang			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	dan Barang Penting
2	BP.01	Barang Penting				
	BP.01.00	Hasil Industri Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi semen, besi beton, baja ringan, triplek, dan barang berbahaya (B2) dalam pengawasan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Penting
	BP.01.01	Penunjang Pertanian dan Pertambangan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Bahan Pokok

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dalam pengawasan, elpiji bersubsidi, dan benih pajale..			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	dan Barang Penting
3	BP.02	Informasi Pasar				
	BP.02.00	Informasi Harga Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyajian data, laporan dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Penting
	BP.02.01	Informasi Stok Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Bahan Pokok dan Barang

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyajian serta penyajian data, laporan dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.			fungsi Kementerian Perdagangan	Penting
4	BP.03	Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
	BP.03.00	Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok yang meliputi komoditi beras, kedelai, daging, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, terigu, dan ikan segar.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Penting
	BP.03.01	Hewan dan Non Serelia Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang penting meliputi benih padi, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Bahan Pokok dan Barang Penting

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI						
I. ESKPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN						
1	EP.00	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan				
	EP.00.00	Peretujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian Surat Peretujuan Ekspor (SPE) Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.01	Peretujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian Surat Peretujuan Ekspor (SPE) Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	EP.00.02	Database Eksportir Naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.03	Identifikasi Komoditi Baru Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi bare terkait Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.00.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tanaman Pangan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan.			fungsi Kementerian Perdagangan	Kehutanan
2	EP.01	Perkebunan				
	EP.01.00	Penyiapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) Hasil Perkebunan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.01	Identifikasi Komoditi Baru Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru mengenai hasil perkebunan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.02	Database	Rahasia	Eselon II	Memimbulkan	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database perkebunan.			kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.03	Bimbingan Teknis/FGD/ dan lain lain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> mengenai perkebunan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.01.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					Perdagangan	
3	EP.02	Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah				
	EP.02.00	Persetujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.01	Bimbingan Teknis/ Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.02	Database Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database ekspor berkaitan dengan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.			keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemirraan dan reputasi	Kehutanan
	EP.02.03	Identifikasi Komoditi Baru Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi barn Tanaman bahan penyegar dan rempah rempah.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.02.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
4	EP.03	Kehutanan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	EP.03.00	Penyiapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) kehutanan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.01	Identifikasi Komoditi Baru Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru kehutanan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	EP.03.02	Database Naskah yang berkaitan dengan database kehutanan.	Rahasia	Eselon I	Memimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	
	EP.03.03	Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/Focus Group Discussion kehutanan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	
	EP.03.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kehutanan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	
II. ESKPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN							
1	IP.00	Tekstil dan Produk Tekstil (TPR), Aneka dan Jasa					

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IP.00.00	Persetujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT), Aneka dan Jasa.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Produk Industri dan Pertambangan
	IP.00.01	Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT), Aneka dan Jasa.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	IP.00.02	Database Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database ekspor berkaitan dengan Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT), Aneka dan Jasa.	Rahasia	Eselon I	Memimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IP.00.03	Identifikasi Komoditi Baru Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tekstil dan Produk Tekstil (TPPT), Aneka dan Jasa.	Terbatas	Eselon III	Merusak kemitraan dan reputasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	IP.00.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
2	IP.01	Barang Kimia, Tambang, dan Limbah				
	IP.01.00	Persetujuan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Produk Industri dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		(SPE) Barang Kimia, Tambang dan Limbah.			fungsi Kementerian Perdagangan	Pertambangan
	IP.01.01	Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> berkaitan Barang Kimia, Tambang dan Limbah.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Produk Industri dan Pertambangan
	IP.01.02	Database Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database ekspor berkaitan dengan Barang Kimia, Tambang dan Limbah.	Rahasia	Eselon II	Memimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	IP.01.03	Identifikasi Komoditi Baru	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Barang Kinia, Tambang dan Limbah.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
	IP.01.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
III. IMPOR						
1	IT.00	Barang Modal				
	IT.00.00	Persetujuan izin impor barang modal bukan baru (Perusahaan Pemakai Langsung)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.01	Peretujuan izin impor barang modal bukan baru (Perusahaan Pemakai Rekondisi)	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.02	Peretujuan izin impor barang modal bukan baru (Perusahaan Remanufaktur)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.03	Peretujuan izin impor barang modal bukan baru (Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.04	Persetujuan Impor Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP)	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.05	Persetujuan impor sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.06	Persetujuan impor barang modal bukan status sewa dalam rangka kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.07	Peretujuan re-impor atas Barang Ekspor asal Indonesia setelah dilakukan pengujian di luar negeri	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.08	Peretujuan Impor Barang Hibah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.09	Peretujuan Pengehuaran Barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.10	Impor Tanpa APJ Barang Asal Indonesia yang telah selesai mengikuti Pammeran di Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.11	Peretujuan tidak mengekspor kembali atas impor sementara barang bukan baru	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.12	Sosialisasi/FGD/Bimtek	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.13	Monitoring dan Pengawasan Importasi Barang Modal	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.14	Verifikasi Penerbitan SPI dan Pengelolaan Dokumen SPI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.00.15	Identifikasi isu dan permasalahan importasi barang modal dll	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.00.16	Database Impor	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Impor
2	IT.01	Barang Pertanian dan Kehutanan				
	IT.01.00	Pengakuan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Beras	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.01	Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Beras			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Impor
	IT.01.02	Peretujuan Impor (PI) Beras-Bulog	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.03	Peretujuan Importir (PI) Gula	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.01.04	Pengkakuan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Gula	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.05	Importir Terdaftar (IT) Produk Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.06	Importir Produsen (IP) Produk Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.01.07	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.08	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.01.09	Verifikasi Komoditi Barang Pertanian dan Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
3	IT.02	Barang Kelautan dan Perikanan				
	IT.02.00	Persetujuan Impor (PI) Mutiara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.02.01	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.02.02	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.02.03	Verifikasi Komoditi Barang Kelautan dan Perikanan	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
4	IT.03	Barang Aneka Industri				
	IT.03.00	Importir Terdaftar (IT). Baja Paduan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.01	Importir Produsen (IP). Baja Paduan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.03.02	Surat Persetujuan Impor (SPI) Baja Paduan	Terbatas	Eselon III	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.03	Importir Terdaftar (IT). Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.04	Importir Produsen (IP). Besi atau Baja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.03.05	Importir Terdaftar (IT), Besi atau Baja	Terbatas	Eselon III	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.06	Importir Produsen (IP), Besi atau Baja Kontraktor Kontrak Kerja sama (K3S)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.07	Importir Produsen (IP), Semen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.03.08	Importir Terdaftar (IT). Semen	Terbatas	Eselon III	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.09	Surat Persetujuan Impor (SPI). Semen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.10	Surat Persetujuan Impor (SPI). Pupuk Bersubsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.03.11	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.12	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.03.13	Verifikasi Komoditi Barang Aneka Industri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					Kementerian Perdagangan	
5	IT.04	Bahan baku industri				
	IT.04.00	Importir Terdaftar (IT). Bahan baku Plastik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.01	Importir Produsen (IP). Bahan baku Plastik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.02	Surat Persetujuan Impor (SPI). Bahan baku Plastik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.04.03	Importir Terdaftar (IT). Cakram Optik	Terbatas	Eselon III	fungsi Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.04	Surat Persetujuan Impor (SPI). Cakram Optik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.05	Surat Persetujuan Impor (SPI). Cakram Optik Kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.04.06	Surat Persetujuan Impor (SPI), Cakram Optik Polycarbonate Optical Grade	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.07	Surat Persetujuan Impor (SPI), Cakram Optik - Mesin Dan Peralatan Mesin Industri non Cakram Optik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.08	Importir Produsen (IP), Pelumas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.04.09	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.10	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.04.11	Verifikasi Komoditi Bahan baku industri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
6	IT.05	Barang konsumsi Tahan Lama				
	IT.05.00	Importir Terdaftar (IT). Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.05.01	Peretujuan Impor. Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) Dan Komputer Tablet,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.05.02	Importir Produsen (IP). Garam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.05.03	Importir Terdaftar (IT), Garam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.05.04	Peretujuan Impor (PI) Garam Industri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.05.05	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.05.06	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.05.07	Verifikasi Komoditi Barang Konsumsi tahan lama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
7	IT.06 IT.06.00	Barang konsumsi tidak tahan lama Importir Terdaftar (IT). Minuman Beralkohol	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.06.01	Peretujuan Impor. Minuman Beralkohol	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.06.02	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.06.03	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
					dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Impor
	IT.06.04	Verifikasi Komoditi Barang Konsumsi Tidak tahan lama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
8	IT.07	Barang Kimia, Tambang dan Limbah				
	IT.07.00	Importir Produsen (IP). Bahan Berbahaya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.07.01	Surat Persetujuan Impor (SPI) Bahan Berbahaya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.02	Importir Terdaftar (IT) Nitro Cellulose	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.03	Surat Persetujuan Impor (SPI) Nitro Cellulose	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.07.04	Importir Produsen (IP) Nitro Cellulose	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.05	Importir Terdaftar (IT) Bahan Peledak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.06	Surat Persetujuan Impor (SPI) Bahan Peledak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.07.07	Importir Terdaftar (IT) Barang Berbasis Sistem Pendingin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.08	Importir Produsen (IP) Bahan Perusak Ozon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.09	Importir Terdaftar (IT) Bahan Perusak Ozon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.07.10	Surat Persetujuan Impor (SPI) Bahan Perusak Ozon (BPO)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.11	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.07.12	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.07.13	Verifikasi Komoditi Kimia dan Bahan Berbahaya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
9	IT.08	Barang Tambang dan Limbah				
	IT.08.00	Importir Produsen (IP) Limbah Non B3 (Terak, abu dan residu)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.01	Importir Terdaftar (IT) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan IT Bahan Bakar Lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.08.02	Surat Persetujuan Impor (SPI) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan SPI Bahan Bakar Lain	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.03	Importir Terdaftar (IT) Prekursor Non Pharmasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.04	Surat Persetujuan Impor (SPI) Prekursor Non Pharmasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.08.05	Importir Produsen (IP) Prekursor Non Pharmasi	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.06	Penetapan Produsen Importir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.07	Importir Produsen (IP) Sodium Tripoly Phosphate	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	IT.08.08	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.09	Monitoring Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor
	IT.08.10	Verifikasi Komoditi Tambang dan Limbah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	
IV. FASILITASI EKSPOR IMPOR							
1	EI.00	Peningkatan Akses Pasar.					
	EI.00.00	Informasi Akses Pasar					
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi Akses pasar internasional sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha berupa <i>trade facilitation</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , serta forum peningkatan dan pemahaman barang strategis dan berbahaya terhadap sistem internasional, monitoring.					Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
	EI.00.01	Imbal Dagang					
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian rancangan kegiatan fasilitasi imbal dagang sesuai dengan ketentuan berupa forum dialog pembahasan masalah dagang lintas batas, monitoring.					Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
		Biasa/Terbuka		Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan		

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2	EI.01	Sistem Pembiayaan dan Pembayaran				
	EI.01.00	Sistem Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi sistem pembiayaan bagi pelaku usaha dalam aktifitas ekspor dan impor.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
3	EI.01.01	Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi sistem Pembayaran bagi pelaku usaha dalam aktifitas ekspor dan impor.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
	EI.02	Ketentuan Asal Barang				
	EI.02.00	Prosedur Ketentuan Asal Barang Naskah yang berkaitan dengan rancangan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya di bidang prosedur ketentuan asal barang Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) melalui kegiatan bimbingan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> / <i>socialisasi/workshop</i> .				
	EI.02.01	Penanganan Masalah SKA Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan masalah terkait penggunaan SKA.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
4	EI.03	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan				
	EI.03.00	Transportasi dan Kepelabuhanan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kelancaran arus barang di daerah/pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan, bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion</i> (asosiasi, pelaku usaha), monitoring dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
	EI.03.01	Kawasan Perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pelayanan perizinan ekspor dan impor di kawasan perdagangan, bimbingan teknis/Focus Group Discussion (asosiasi, pelaku usaha), monitoring dan evaluasi.			kinerja Kementerian Perdagangan	Fasilitasi Ekspor Impor
5	EI.04	Pelayanan Ekspor dan Impor Perdagangan				
	EI.04.00	Analisa Pelayanan Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis layanan ekspor impor perdagangan melalui sosialisasi/bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion/ workshop</i> seperti kegiatan perizinan inatrade, monitoring dan evaluasi, dan database.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor
	EI.04.01	Fasilitasi Pelayanan Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan konsultasi ekspor dan impor perdagangan melalui	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		sosialisasi/bimbingan teknis/ <i>Focus Group Discussion/workshop</i> seperti kegiatan perizinan intratrade, monitoring dan evaluasi, dan database, maintenance dan peningkatan layanan sistem dan aplikasi <i>online</i> .				
V. PENGAMANAN PERDAGANGAN						
1	PP.00	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan hambatan teknis perdagangan yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi/laporan pelaku usaha dari perwakilan Indonesia/kebijakan dari otoritas negara tujuan ekspor, konsultasi/pertemuan untuk penanganan di negara mitra dagang, fasilitasi penyelesaian sengketa, Focus Group Discussion, monitoring dan evaluasi, pencatatan riwayat penanganan kasus di profil kasus.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengamanan Perdagangan
2	PP.01	Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi,	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Safeguard Naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan dumping, subsidi, <i>safeguard</i> yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi dari negara penuduh, dokumen petisi, surat interested parties, dokumen kuesioner, advokasi/pendampingan teknis penanganan hambatan perdagangan, penyusunan submisi/ tanggapan pemerintah, dengar pendapat, pendampingan saat on the spot investigation, verifikasi kasus tuduhan subsidi, dokumen <i>provisional measures disclosure</i> , dokumen final determinaton, penyampaian hasil.			kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pengamanan Perdagangan
3	PP.02	Pengajuan Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) Naskah yang berkaitan dengan Pengajuan DSB WTO terhadap penanganan tuduhan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan	Direktorat Pengamanan Perdagangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dumping, surat dan draft permintaan legal opinion ke ACWL, permintaan konsultasi, surat dirjen terkait permintaan pengajuan dispute, surat notifikasi dari Indonesia ke WTO, pembentukan panel (<i>establishment, composition, first written submission, first meeting on the panel, second written submission, second meeting panel, panel report issued to the parties</i>).			kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
4	PP.03	Database Naskah yang berkaitan dengan database penanganan perdagangan meliputi profil kasus, dokumen terkait (<i>petisi, submisi, preliminary measures, final determination, legal drafting</i> , profil perusahaan, profil negara).	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengamanan Perdagangan
5	PP.04	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis hambatan perdagangan.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pengamanan Perdagangan
C. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA						
I. STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU						
1	SM.00	Perumusan dan Penerapan Standar				
	SM.00.00	Penerapan Standar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/supervisi/fasilitasi/diseminasi/konsultasi penerapan standarisasi di bidang perdagangan, laporan kegiatan evaluasi penerapan standar.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.00.01	Perumusan Standar Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan konsep rancangan kebijakan standarisasi di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
2	SM.01	Bimbingan dan Sarana Mutu				
	SM.01.00	Bimbingan Mutu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi/fasilitasi/ diseminasi/konsultasi bimbingan mutu, konsep promosi dan publikasi standarisasi bidang perdagangan.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Standarisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.01.01	Sarana Mutu Naskah yang berkaitan dengan konsep standar acuan mutu produk, atau komoditi sesuai dengan ketentuan, konsep informasi standar mitra tujuan ekspor, konsep promosi dan publikasi standarisasi bidang sarana mutu perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
3	SM.02	Verifikasi Mutu				
	SM.02.00	Verifikasi dan Pengendalian Mutu Barang Impor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dalam rangka pemberian dokumen usulan Nomor Pendaftaran Barang (NPB),	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kegiatan pemantauan pra pasar terhadap mutu barang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), dokumen hasil kecepakatan kerjasama terkait verifikasi dan pengendalian mutu barang impor, kegiatan bimbingan teknis/supervisi/diseminasi/konsultasi verifikasi dan pengendalian mutu barang impor.			Perdagangan	
	SM.02.01	Verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dalam rangka pemberian dokumen usulan pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan lembaga penilaian kesesuaian (LPK), dokumen usulan pemberian Nomor Registrasi Produk (NRP), kegiatan pemantauan kinerja lembaga penilaian kesesuaian (LPK), kegiatan pemantauan mutu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		bahan olah komoditi ekspor (BOKOR) dan bahan olah karet standar Indonesia Rubber (BOKAR SIR), kegiatan bintek/supervisi/diseminasi/konsultasi verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor, laporan kegiatan verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor.				
4	SM.03	Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang				
	SM.03.00	Rancangan Kebijakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.03.01	Bimbingan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian
		Naskah yang berkaitan dengan penyiapan rancangan kebijakan terkait jabatan fungsional penguji mutu barang.				
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/supervisi/diseminasi/konsultasi jabatan fungsional penguji mutu				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		barang, kegiatan rapat kordinasi terkait jabatan fungsional penguji mutu barang.			Kementerian Perdagangan	Mutu
	SM.03.02	Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) hingga proses Penetapan Angka Kredit (PAK), kegiatan uji kompetensi, laporan kegiatan Uji Kompetensi Nasional, database jabatan fungsional penguji mutu barang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
5	SM.04	Kelembagaan Standardisasi				
	SM.04.00	Kelembagaan Standardisasi Nasional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit internal, implementasi kerjasama kelembagaan standarisasi nasional, kaji ulang dokumen dan manajemen sistem mutu, pengelolaan dokumentasi dan informasi publik bidang pengendalian mutu barang, kegiatan monitoring pemeliharaan sistem	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		mutu.				
	SM.04.01	Kelembagaan Standardisasi Internasional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi/diseminasi/konsultasi kelembagaan standardisasi internasional, bahan rancangan kebijakan bidang mutu barang dan standardisasi internasional, dokumen kerjasama di bidang standardisasi dan pengendalian mutu lingkup internasional, laporan kegiatan kelembagaan standardisasi internasional.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
6	SM.05	Pengujian Mutu Barang				
	SM.05.00	Pelayanan Jasa Pengujian Naskah yang berkaitan dengan dokumen proses pelayanan pengujian.	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	SM.05.01	Pengembangan Jasa Pengujian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jasa pengujian, dokumen mutu, rekaman mutu, kaji ulang mutu dokumen, kaji ulang manajemen, sarana pendukung kegiatan pengujian yang sesuai dengan standar nasional/internasional, kegiatan validasi atau verifikasi software (pengembangan metode pengujian), melakukan akreditasi laboratorium pengujian.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
7	SM.06	Kalibrasi				
	SM.06.00	Pelayanan Jasa Kalibrasi Naskah yang berkaitan dengan dokumen proses pelayanan kalibrasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	SM.06.01	Pengembangan Jasa Kalibrasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jasa kalibrasi, dokumen mutu, rekaman mutu, kaji ulang mutu dokumen, kaji ulang manajemen, kegiatan validasi atau verifikasi software (pengembangan metode kalibrasi), melakukan akreditasi laboratorium kalibrasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Mutu Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu
8	SM.07 SM.07.00	Sertifikasi Pelayanan Jasa Sertifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sertifikasi produk dan pelayanan sertifikasi personal.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	SM.07.01	Pelayanan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pelatihan.	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.07.02	Pengembangan Jasa Sertifikasi Naskah yang berkaitan dengan dokumen mutu, keji ulang manajemen, pengelolaan personil.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.07.03	Pelayanan Sertifikasi Produk Naskah yang berkaitan dengan pengkajian ulang dokumen Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro), audit internal LSPPro, Perjanjian Kerja Personal, Rapat dewan sertifikasi, penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kerja personil evaluasi, evaluasi dan verifikasi sub kontrak.			Perdagangan	
	SM.07.04	Pelayanan Sertifikasi Person Naskah yang berkaitan dengan kaji ulang dokumen Lembaga Sertifikasi Person (LSP), audit internal LSP, rapat komite skema, pengelolaan kinerja pengujian dan pengawasan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
	SM.07.05	Pelayanan Pelatihan Naskah yang berkaitan dengan kajian ulang dokumen Lembaga Penilaian (LP), Audit Internal LP, dan Pengelolaan Pengajar.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
II. PEMBERDAYAAN KONSUMEN						
1	PK.00	Analisa Perlindungan Konsumen				
	PK.00.00	Konsultasi Perlindungan Konsumen Naskah yang berkaitan dengan pengaduan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Direktorat Pemberdayaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		konsumen, klarifikasi, tindak lanjut, dan berita acara, pengaduan konsumen yang tidak ditindaklanjuti, permintaan saksi ahli, bimtek sistem pengawasan perlindungan konsumen.			Perdagangan	Konsumen
	PK.00.01	Analisa dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan kebijakan Perlindungan Konsumen, bimbingan teknis yang berkaitan dengan mediator bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), peningkatan kualitas penanganan sengketa konsumen.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.00.02	Penyusunan Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Keamanan dan Akses Arsip.				
2	PK.01	Pelayanaan Pengaduan Konsumen				
	PK.01.00	Konsultasi Pengaduan Konsumen Naskah yang berkaitan dengan konsultasi konsumen dalam rangka perlindungan konsumen.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.01.01	Penanganan Pengaduan Konsumen Naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan Konsumen, hingga tindak lanjut melalui mediasi dan lain sebagainya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
3	PK.02	Jejaring Perlindungan Konsumen				
	PK.02.00	Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan forum dialog dengan perguruan tinggi, dan stakeholder.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PK.02.01	Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan forum pertemuan dengan ASEAN <i>committee on consumer protection</i> , serta forum kerjasama dalam negeri.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
4	PK.03	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha				
	PK.03.00	Bimbingan Konsumen Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis perlindungan konsumen, penyuluhan perlindungan konsumen, fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat, pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
	PK.03.01	Bimbingan Pelaku Usaha Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan kepada pelaku usaha melalui	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan asosiasi perusahaan				
5	PK.04	Fasilitasi Kelembagaan				
	PK.04.00	Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi bimbingan teknis bagi sumber daya manusia dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.				
	PK.04.01	Penyelesaian Sengketa Konsumen	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
		Naskah yang berkaitan dengan Kegiatan pemberdayaan penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bimbingan teknis				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kepaniteraan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bimbingan teknis sumber daya manusia bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.				
III. PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA						
1	BJ.00	Produk Logam, Mesin dan Elektronika				
	BJ.00.00	Produk Logam dan Mesin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.00.01	Produk Elektronika	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk logam dan mesin, antara lain: surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk elektronika, antara lain: surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
2	BJ.01	Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka				
	BJ.01.00	Produk Hasil Pertanian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil pertanian, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.				
	BJ.01.01	Produk Hasil Kimia dan Aneka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil kimia dan aneka, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar
3	BJ.02	Jasa				
	BJ.02.00	Jasa Distribusi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa distribusi, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.			fungsi Kementerian Perdagangan	dan Jasa
	BJ.02.01	Jasa Bisnis Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa bisnis, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
4	BJ.03	Petunjuk Teknis Pengawasan Barang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Beredar dan Jasa			kinerja Kementerian Perdagangan	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		Naskah yang berkaitan dengan persiapan penyusunan rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) pengawasan barang beredar.				
5	BJ.04	Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNSPK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.04.00	Analisa Kasus Perlindungan Konsumen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat apresiasi atau surat teguran, kerangka analisa kasus hasil pengawasan, dan rekomendasi pelimpahan kasus.				
	BJ.04.01	Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Pengawasan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, bimtek terhadap PPBJ dan PPNS-PK.			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Barang Beredar dan Jasa
6	BJ.05	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen				
	BJ.05.00	Penegakan hukum pengawasan produk logam, mesin dan elektronika dan jasa distribusi Naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, Anatomi Kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
	BJ.05.01	Penegakan Hukum Pengawasan Produk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil Pertanian kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Satgas dalam rangka pengawasan terpadu, mulai dari keputusan pembentukan satuan tugas sampai dengan laporan.				
IV. METROLOGI						
1	MR.00	Sarana dan Kerja sama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.00.00	Sarana Metrologi Legal				
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) dan Dinas, Cap Tanda Tera (CTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan metrologian dari UPTD dan Dinas.				
	MR.00.01	Kerjasama Metrologi Legal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Metrologi
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama baik dalam dan luar negeri di bidang Kemetrologian antara lain nota				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kesepehaman (MoU) Kerjasama, partisipasi sidang luar negeri, workshop kemetrologian negara <i>anggota Asia pasific Legal Metrology Forum</i> , dan lain-lain.			Kementerian Perdagangan	
	MIR.00.02	Peraturan Perundang-undangan Naskah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
2	MIR.01	Kelembagaan dan Penilaian				
	MIR.01.00	Kelembagaan Metrologi Legal Naskah yang terkait dengan dokumen mengenai pendirian UPTD, serta monitoring dan evaluasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MIR.01.01	Penilaian Metrologi Legal Naskah yang berkaitan dengan surveillance, bimbingan teknis, penilaian UPTD, dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		penilaian ulang UPTD.				
3	MR.02	Ukuran, Takaran, Timbangan dan Kelengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran				
	MR.02.00	Besaran Massa, Listrik, Tekanan, dan Suhu Naskah yang berkaitan dengan dokumen rekomendasi barang contoh, barang tidak wajib izin tipe dan database	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Metrologi
	MR.02.01	Izin Tipe Naskah yang berkaitan dengan dokumen izin tipe dan database.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	MR.02.02	Label Tipe Naskah yang berkaitan dengan dokumen label tipe dan databasc.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Metrologi
4	MR.03	Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian				
	MIR.03.00	Penera dan Pranata Laboratorium Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, keputusan tentang penempatan/pencabutan sebagai pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrologian, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/ <i>in-house</i> seminar jabatan fungsional.				
	MR.03.01	Pengamatan Tera dan Pengawas Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS Metrologi Legal, pendidikan dan pelatihatn teknis dan fungsional, peraturan di bidang jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrologian, standar kompetensi jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrologian, database, serta evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
5	MR.04	Penegakan Hukum dan Bimbingan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Operasional Kemetrologian				
	MR.04.00	Pengawasan UTTP Naskah yang berkaitan dengan daerah tertib ukur, pasar tertib ukur, pengawasan dan penegakan hukum terhadap UTTP, penelaahan kasus untuk penelaahan UTTP.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
	MR.04.01	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional Naskah yang berkaitan dengan forum pengawasan kemetrologian, peredaran BDKT, pengawasan dan penegakan hukum terhadap BDKT, penelaahan kasus untuk pengawasan BDKT, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
6	MR.05	Balai Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU)				
	MR.05.00	Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan dokumen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		sistem mutu, rekaman sistem mutu, Rekaman pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukur Besar Massa dan Panjang, sertifikat kalibrasi standar, peraturan standar internasional/standar nasional, laporan kegiatan, dan sertifikat akreditasi.			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	
	MR.05.01	Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan rekaman teknis kalibrasi dan verifikasi, serta rekaman teknis yang didigitalisasi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
7	MR.06	Pengujian Alat UTTP				
	MR.06.00	Bimbingan Mutu Naskah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode pengukuran, pengujian UTTP, untuk mendapatkan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		akreditasi dan sertifikasi dari Badan Akreditasi : komite akreditasi nasional			Perdagangan	
	MR.06.01	Pelayanan Teknis Naskah yang berkaitan dengan pengujian UTTTP dalam rangka izin tipe, dan izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTTP penanganan khusus didalam maupun diluar kantor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
8	MR.07	Standardisasi Metrologi Legal				
	MR.07.00	Bimbingan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan metrologi legal, dan pendataan potensi UTTTP, sosialisasi metrologi bagi kabupaten/kota, fasilitasi pegawai berhak, fasilitasi pengamat tera, upgrading ilmu kemetrologian, fasilitasi daerah terah ukur/pasar terah ukur,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		monitoring penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium, dan bimbingan teknis kemetrologian.				
	MR.07.01	Pelayanan Kemetrologian Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tera dan/tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP, verifikasi standar satuan ukuran, uji banding lab metrologi pemerintah daerah, peningkatan/evaluasi manajemen mutu laboratorium, serta dukungan tugas pokok dan fungsi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi
V. TERTIB NIAGA						
1	TN.00	Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)				
	TN.00.00	Pengawasan Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)	Rahasia	Eselon II	Memimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,	Direktorat Tertib Niaga

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).			keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
	TN.00.01	Pendaftaran Barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Tertib Niaga
2	TN.01	Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)				
	TN.01.00	Analisa Kasus Perdagangan Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kasus perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Tertib Niaga
	TN.01.01	Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Tertib Niaga

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pelaporan di bidang bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG).				
3	TN.02	Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Perdagangan Lainnya				
	TN.02.00	Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum perizinan perdagangan dalam negeri dan perdagangan lainnya.	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Tertib Niaga
	TN.02.01	Seksi Penegakan Hukum Perizinan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Perdagangan Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan hukum perizinan perdagangan luar negeri.			kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Tertib Niaga
4	TN.03	Pengakuan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang yang Diatur				
	TN.03.00	Pengakuan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan hukum distribusi barang pokok	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Tertib Niaga

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan penting.				
	TN.03.01	Penegakan Hukum Distribusi Barang yang Diatur Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum distribusi barang yang diatur, termasuk barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Tertib Niaga
D. DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL						
I. PERUNDINGAN MULTILATERAL						
1	PM.00	Perundingan				
	PM.00.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan rapat persiapan perundingan, keputusan tentang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat Perundingan Multilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pembuatan tim, materi sidang, laporan kegiatan dan program kerja mengenai perundingan.			fungsi Kementerian Perdagangan	
	PM.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil perundingan, serta brafaks hasil sidang serta laporan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
	PM.00.02	Pasca Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan <i>working group, workshop, dan Policy Dialogue</i> , serta dokumen proses ratifikasi fasilitasi perdagangan dan dokumen asli protokol perjanjian.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
	PM.00.03	Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PM.00.03	Hasil Ratifikasi Naskah yang berkaitan dengan hasil ratifikasi (Rancangan Keputusan Presiden).	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
2	PM.01	Penanganan Sengketa				
	PM.01.00	Periapan Penanganan Sengketa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat persiapan perundingan, serta materi sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
	PM.01.01	Pelaksanaan Penanganan Sengketa Naskah yang berkaitan dengan pembahasan penganganan masalah sengketa dan juga laporan mengenai hasil penanganan sengketa.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PM.01.02	Pasca Penanganan Sengketa Naskah yang berkaitan dengan laporan <i>workshop dan policy dialogue</i> .	Terbatas	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
3	PM.02	Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan ketentuan perdagangan dan juga proses notifikasinya.	Terbatas	Eselon III	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
4	PM.03	Akses Pasar (Barang Pertanian dan Non Pertanian) Naskah yang berkaitan dengan tarif barang dan non tarif barang.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
5	PM.04	Instrumen Perdagangan (Revisi dari Multilateral) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Instrumen Perdagangan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral
6	PM.05	Hak Kekayaan Intelektual, investasi, lingkungan dan pembangunan Naskah yang berkaitan dengan hak kekayaan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,	Direktorat Perundingan Multilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		intelektual dan juga isu baru serta lingkungannya.			keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
II. PERUNDINGAN ASEAN						
1	PA.00	Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN (Akses Pasar dan Kepabeanan)				
	PA.00.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brataks hasil sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PA.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).	Terbatas	Eselon III	Kementerian Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.00.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
2	PA.01	Investasi Usaha Kecil dan Menengah dan daya saing isu-isu ASEAN				
	PA.01.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang terkait Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Isu-isu ASEAN.			Perdagangan	
	PA.01.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait investasi, usaha kecil, dan menengah, daya saing dan isu-isu ASEAN.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.01.02	Laporan Hasil Sidang Perundingan (revisi Dir. ASEAN) Naskah yang berkaitan dengan laporan laporan hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.01.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
3	PA.02	ASEAN Mitra Dialog				
	PA.02.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.02.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.02.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PA.02.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan mitra dialog.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Perdagangan Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
4	PA.03	Kerja sama Antar dan Sub Regional				
	PA.03.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding dan juga materi sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.03.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan, dan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PA.03.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	PA.03.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
5	PA.04	Proses Ratifikasi Agreement Naskah yang berkaitan dengan proses ratifikasi <i>agreement</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
6	PA.05	Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Naskah yang berkaitan dengan Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
III. APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL						
1	AO.00	Perundingan APEC				
	AO.00.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding, serta materi sidang.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	AO.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brataks hasil siding	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
	AO.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Perundingan ASEAN

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	AO.00.03	Tindak lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kementerian Perdagangan Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan ASEAN
2	AO.01	Badan-badan PBB dan Non PBB Naskah yang berkaitan dengan hasil sidang Badan-badan PBB dan Non PBB, proses ratifikasi, dan hasil ratifikasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional
3	AO.02	Organisasi Komoditi Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional
	AO.02.00	Perundingan Organisasi Komoditi Naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		perundingan.			Kementerian Perdagangan	
	AO.02.01	Tindak Lanjut Hasil Sidang Naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional
	AO.02.02	Data Komoditi Internasional Naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional
4	AO.03	Diseminasi Hasil Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat APEC dan Organisasi Internasional
IV. PERUNDINGAN BILATERAL						
1	PB.00	Pra Perundingan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PB.00.00	Persiapan Naskah yang berkaitan dengan persiapan perundingan seperti kertas posisi, agenda, dan lain-lain.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
	PB.00.01	Draft Perjanjian Naskah yang berkaitan dengan penyusunan draft perjanjian sampai draft tersebut tersusun.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
2	PB.01	Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundingan meliputi <i>trade agreement</i> , <i>MoU</i> , <i>Joint Statement</i> , <i>Agreed Minutes</i> , dan <i>Preferential Trade Agreement</i> . <i>FTA</i> , <i>CEPA</i> , <i>ECA</i> ,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Direktorat Perundingan Bilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		<i>BTMF, Sub. Mission on GSP</i> dan sebagainya.			Perdagangan	
3	PB.02	Pasca Perundangan				
	PB.02.00	Konsultasi Publik di Pusat dan Daerah Naskah yang berkaitan dengan proses dan laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
	PB.02.01	Proses Ratifikasi Naskah yang berkaitan dengan naskah penjelasan, rancangan peraturan presiden, terjemahan serta naskah perjanjian.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
V. PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA						
1	PJ.00	Jenis Perundingan Jasa (Jasa Bisnis, Jasa distribusi, dan keuangan, Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, Jasa pendidikan dan kesehatan, Jasa komunikasi, lingkungan, dan energi, Jasa				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		transportasi dan logistik				
	PJ.00.00	Periapan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
	PJ.00.01	Pelaksanaan Perundingan Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Taiwan.				
	PJ.00.02	Laporan Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC PTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, IndonesiaJepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
	PJ.00.03	Tindak Lanjut Hasil Perundingan Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FM, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, IndonesiaJepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Bilateral
2	PJ.01	Rules, peraturan domestic dan penyusunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		analisis informasi Naskah yang berkaitan dengan peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi terkait terkait, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa keuangan, jasa konstruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan olahraga, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan, jasa energi, jasa transportasi, jasa logistik, jasa e-commerce.			kinerja Kementerian Perdagangan	Perundingan Perdagangan Jasa
3	PJ.02	Konsultasi Publik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi publik seperti Workshop, Focus Group Discussion, Dialog Series, dan lain-lain terkait workshop, Focus Group Discussion, Dialogue series, konsultasi Publik, rapat koordinasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

E. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
I. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR						
1	IE.00	Pengembangan Pasar Ekspor				
	IE.00.00	Analisa Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
		Naskah yang berkaitan dengan Market Inteligent, survei data dan lapangan, Market Brief penyedia informasi ringkas pasar tujuan ekspor, laporan hasil kegiatan, serta peta pasar tujuan ekspor.				
	IE.00.01	Penyebarluasan Informasi dan Peluang Pasar Ekspor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
		Naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan laporan hasil penyebarluasan informasi dan peluang pasar ekspor.				
2	IE.01	Pengembangan Sistem Informasi Ekspor				
	IE.01.00	Pengelolaan Data Ekspor	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Pasar dan
		Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemutakhiran data serta neraca				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		perdagangan dan analisis informasi ekspor.				Informasi Ekspor
	IE.01.01	Sistem Informasi Ekspor Naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, situs website, termasuk implementasi aplikasi online, bimbingan teknis, membership sistem dan promosi <i>online</i> , data member serta pengelolaan jaringan informasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
3	IE.02	Pelayanan Informasi Ekspor				
	IE.02.00	Pelayanan Pelaku Usaha Naskah yang berkaitan dengan <i>customer service center</i> data pelaku usaha, <i>Gathering</i> , <i>permanent trade display</i> , <i>inquiry</i> , dan juga pemberian penghargaan/primawarta dan primaduta.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
	IE.02.01	Publikasi Informasi Ekspor Naskah yang berkaitan dengan publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Direktorat Pengembangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		informasi ekspor berupa leaflet, brosur, dan lain-lain.			Perdagangan	Pasar dan Informasi Ekspor
II. PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR						
1	PE.00	Hasil Industri Manufaktur (mesin, logam, elektronik dan telematika, pangan, TPT, slat kesehatan, dan aneka).				
	PE.00.00	Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial, pengamatan produk ekspor di negara pesaing serta laporan hasil identifikasi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk ekspor, profil produk, katalog, rebranding, partisipasi pada peningkatan daya saing produk ekspor, serta pengembangan produk	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kerajinan dan partisipasi pada pengembangan produk kreatif.				
	PE.00.02	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.00.03	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
2	PE.01	Produk Agro				
	PE.01.00	Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PE.01.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding, dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.01.02	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, <i>workshop</i> desain, desain <i>award</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
3	PE.02	Jasa (jasa bisnis dan profesi, konstruksi dan distribusi)				
	PE.02.00	Identifikasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.				
	PE.02.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.02.02	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services (DDS)</i> , pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, <i>workshop</i> desain, desain <i>award</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
4	PE.03	Produk Kreatif (media dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan desain).				
	PE.03.00	Identifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.01	Pengembangan Produk Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, <i>rebranding</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
	PE.03.02	Pengembangan Desain Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi <i>designer dispatch services (DDS)</i> , pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, <i>workshop</i> desain, desain <i>award</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor
III. KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR						
1	KE.00	Luar Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	KE.00.00	MoU/Perjanjian Kerja Sama Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian pengembangan ekspor hingga pelaporan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor
	KE.00.01	Aktivasi/diseminasi Implementasi Hasil Kerja Sama Pengembangan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi pengembangan ekspor hingga pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor
	KE.00.02	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor
2	KE.01	Dalam Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)				
	KE.01.00	Identifikasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian	Direktorat Kerjasama

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.			Perdagangan	Pengembangan Ekspor
	KE.01.01	Mou/Perjanjian Kerja Sama Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/ Perjanjian kerja sama dalam negeri hingga pelaporan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor
	KE.01.02	Aktivasi/Diseminasi Implementasi Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi implementasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor
	KE.01.03	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
IV. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA						
1	PC:00	Promosi Dagang (Dalam Negeri dan Luar Negeri)				
	PC:00.00	Partisipasi Pameran Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi pameran dagang mulai dan undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil pameran.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
	PC:00.01	Partisipasi Misi Dagang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil misi dagang.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
	PC:00.02	Partisipasi Misi Pembelian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi pembelian mulai dari koordinasi perwakilan luar negeri sampai pembuatan laporan hasil misi pembelian.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PC.00.03	Sosialisasi Promosi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi promosi mulai dari survei ke calon peserta sampai pembuatan laporan hasil sosialisasi promosi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
2	PC.01	Pencitraan				
	PC.01.00	Perencanaan Naskah yang berkaitan dengan pembuatan video <i>nation branding</i> , <i>Focus Group Discussion</i> , pembuatan video peningkatan citra produk Indonesia, serta laporan hasil kegiatan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
	PC.01.01	Penerapan Citra Naskah yang berkaitan dengan penerapan citra, yaitu pembuatan video <i>nation branding</i> dan lain-lain, pembuatan kit promosi serta laporan hasil kegiatan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra
	PC.01.02	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Direktorat

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kuesioner pemantauan dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan.			kinerja Kementerian Perdagangan	Pengembangan Promosi dan Citra
V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA						
1	DE.00	Perencanaan/Persiapan Diklat Ekspor				
	DE.00.00	Analisis Kebutuhan Naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan ekspor.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
	DE.00.01	Pengembangan Kurikulum Naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan pelaksanaan pengembangan metodologi dan kurikulum.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
	DE.00.02	Promosi dan Publikasi Naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		hubungan masyarakat.				Ekspor Indonesia
	DE.00.03	Kerjasama dan Pelayanan Jasa Naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring, peningkatan kompetensi sumber daya manusia/eksport, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
2	DE.01	Penyelenggaraan Diklat Ekspor Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
3	DE.02	Monitoring dan Evaluasi Diklat Ekspor Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4	DE.03	Database Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan database tenaga pengajar.	Terbatas	Eselon III	Perdagangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Indonesia Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
5	DE.04	Database peserta pelatihan Naskah yang berkaitan dengan database Peserta pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
F. BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI						
I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN						
1	UD.00	Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)				
	UD.00.00	Rancangan Undang-undang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Biro Peraturan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.			dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Perundang-undangan dan Penindakan
	UD.00.01	Rancangan Peraturan Pemerintah Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
	UD.00.02	Rancangan Peraturan Presiden Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
	UD.00.03	Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan Naskah yang berkaitan penyusunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan mulai dari rancangan awal sampai ditetapkan.			fungsi Kementerian Perdagangan	Penindakan
	UD.00.04	Peraturan/ Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.	<u>Biasa/Terbuka</u>	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
2	UD.01	Pelayanan Hukum				
	UD.01.00	Penegakan Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, kegiatan penyidik PPNS, berkas administrasi serta penyelesaian PPNS.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	UD.01.01	Pemberian Pelayanan Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum serta asistensi hukum terhadap pengaduan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
	UD.01.02	Penanganan Perkara Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan/ gugatan/ Laporan kepolisian, pra peradilan, perdata, tata usaha negara, arbitrase.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
3	UD.02	Penindakan Pelanggaran				
	UD.02.00	Pelanggaran Ilegal Naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ilegal.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan
	UD.02.01	Pelanggaran Legal Naskah yang berkaitan dengan penindakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Peraturan Perundang-

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Legal.			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	undangan dan Penindakan
II. PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK						
1	PF.00	Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
	PF.00.00	Pengawasan Transaksi Bursa Berjangka Naskah yang berkaitan dengan laporan transaksi harian, mingguan dan bulanan pelaku usaha PBK, proses pemeriksaan dan analisa transaksi bursa berjangka pelaku usaha PBK, laporan hasil pengawasan dan koordinasi internal terkait peneraan sanksi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
	PF.00.01	Data Transaksi Bursa Berjangka Naskah yang berkaitan dengan data transaksi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Pengawasan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		bursa berjangka seperti jumlah, volume, nilai transaksi, data pelaku usaha PBK, data kontrak komoditi, dan lain-lain).			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Pasar Berjangka dan Fisik
	PF.00.02	Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pelaku usaha PBK meliputi data transaksi, analisa data, laporan hasil pengawasan, proses penyampaian LHP ke pelaku usaha dan koordinasi internal terkait peneraan sanksi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
	PF.00.03	Pengawasan Transaksi Pasar Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pasar fisik meliputi data harga komoditi, data spesifikasi kontrak komoditi, analisa data, rekomendasi kelayakan lokasi serah terima fisik, laporan hasil pengawasan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2	PF.01	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi				
	PF.01.00	Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan laporan keuangan pelaku usaha PBK meliputi data laporan keuangan pelaku usaha PBK, rekapitulasi penyampaian data laporan keuangan, analisa laporan keuangan, laporan hasil evaluasi/pengawasan dan proses pengenaan sanksi denda.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
	PF.01.01	Pengawasan Pialang Berjangka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pialang berjangka meliputi Data Pialang Berjangka, Identifikasi dan pemeriksaan data/tabel kesesuaian laporan, Matriks keterlambatan, Hasil analisa, Laporan hasil pemantauan dan evaluasi, Koordinasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		dengan unit terkait (Tindak lanjut), Himbauan kepada pelaku yang belum/terlambat menyampaikan laporan, Laporan hasil pengawasan.				
	PF.01.02	Pengawasan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan laporan tahunan pelaku usaha PBK meliputi data laporan tahunan pelaku usaha PBK, Matriks Kesesuaian Laporan, Hasil pemantauan dan evaluasi, Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi, Himbauan terhadap pelaku usaha yang belum/terlambat menyampaikan laporan, Laporan Hasil Pengawasan Laporan Tahunan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
3	PF.02	Audit Pelaku Usaha PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Pengawasan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		pelaksanaan audit terhadap pelaku usaha PBK mulai dari surat pemberitahuan audit rutin sampai kepada pembuatan laporan hasil audit termasuk rekomendasi hasil audit.			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Pasar Berjangka dan Fisik
III. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR						
1	BP.00	Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (pelaku pasar dan kelembagaan)				
	BP.00.00	Pemberian Izin Usaha dan Persetujuan Perdagangan Berjangka Komoditi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian izin usaha pialang berjangka, pedegang berjangka, bursa berjangka, kliring berjangka, pemberian izin wakil pialang berjangka dan persetujuan PBK: bank penjaminan margin, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, persetujuan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		(SPA), persetujuan peserta SPA, persetujuan perubahan alamat pelaku usaha PBK, pemberian perubahan nama pelaku usaha PBK, persetujuan pialang untuk penyaluran amanat nasabah bursa luar negeri, persetujuan perubahan pengurus/pemegang saham pelaku usaha PBK, persetujuan pemberhentian direktur kepatuhan, persetujuan untuk melakukan kegiatan promosi/iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang PBK, mulai dari proses awal sampai akhir				
	BP.00.01	Pencabutan Izin Pelaku Usaha dan Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan izin pelaku usaha dan kelembagaan.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
	BP.00.02	Database Pelaku Usaha PBK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Biro Pembinaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan Database Pelaku Usaha PBK.			kinerja Kementerian Perdagangan	dan Pengembangan Pasar
	BP.00.03	Pelatihan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Focus Group Discussion bagi pelaku usaha PBK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan teknis dan lain-lain bagi pelaku usaha PBK.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
	BP.00.04	Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Profesi wakil pialang berjangka.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
2	BP.01	Pengembangan Pasar				
	BP.01.00	Pemberian Persetujuan Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian persetujuan mulai dari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Pembinaan dan Pengembangan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		persetujuan peraturan dan tata tertib (PTT) bursa dan lembaga sampai persetujuan kontrak berjangka.			fungsi Kementerian Perdagangan	Pasar
	BP.01.01	Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK dan Sistem Resi Gudang (SRG) Naskah yang berkaitan dengan analisis pengembangan kelembagaan dan produk PBK dan SRG serta kegiatan pertemuan teknis, <i>Focus Group Discussion</i> .	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
3	BP.02	Pengembangan Data dan Teknologi Informasi				
	BP.02.00	Pengembangan Data Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data seperti statistik harga komoditi dan harga berjangka, data harga komoditi, data harga bursa berjangka, dan pengelolaan sistem informasi harga komoditi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
	BP.02.01	Teknologi Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Biro Pembinaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan panduan pengguna aplikasi serta Lisensi software windows server.			kinerja Kementerian Perdagangan	dan Pengembangan Pasar
4	BP.03	Monitoring dan Evaluasi Harga Komoditi Pasar Berjangka dan Fisik Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan pasar.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK)						
1	PR.00	Pembinaan Sistem Resi Gudang Naskah yang berkaitan dengan proses pembinaan SRG/Pemberian Persetujuan meliputi persetujuan pengelola gudang SRG, persetujuan gudang, persetujuan lembaga penilai kesesuaian.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengawasan
2	PR.01	Pengawasan Sistem Resi Gudang Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan SRG meliputi pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Pembinaan dan Pengawasan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		terhadap gudang dan pengelola gudang, pengawasan terhadap bank penyalur pembiayaan skema resi gudang, database transaksi dan kelembagaan SRG sampai pembuatan laporan hasil pengawasan.			fungsi Kementerian Perdagangan	
3	PR.02	Pembinaan dan Pengawasan PLK				
	PR.02.00	Pembinaan PLK Naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan penyelenggara PLK, serta pemberian persetujuan lembaga penjamin pasar lelang.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengawasan
	PR.02.01	Pengawasan PLK Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penyelenggaraan PLK meliputi tertib administrasi, tata cara pelaksanaan PLK, data transaksi dan realisasi pasar lelang komoditas serta laporan hasil pengawasan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengawasan
4	PR.03	Bimbingan teknis/Sosialisasi/Workshop	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu	Biro Pembinaan

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis PLK dan SRG, sosialisasi, workshop, dan lain-lain.			kinerja Kementerian Perdagangan	dan Pengawasan
5	PR.04	Monitoring dan Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PLK dan SRG.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak mengganggu kinerja Kementerian Perdagangan	Biro Pembinaan dan Pengawasan
G. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA						
1	AD.00	Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi Naskah yang berkaitan dengan Pembuktian Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Anti Dumping Indonesia
2	AD.01	Penyelidikan Pembuktian Kerugian Naskah yang berkaitan dengan Pembuktian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Komite Anti Dumping

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
		kerugian industri dalam negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri.			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Indonesia
3	AD.02	Pengumpulan, Penelitian, dan Pengolahan Bukti dan Informasi Terkait dengan Penyelidikan Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Anti Dumping Indonesia
4	AD.03	Pembuatan rekomendasi penguasaan Bea Masok Antidumping dan Bea Masok Naskah yang berkaitan dengan Pembuatan rekomendasi penguasaan Bea Masok Antidumping dan Bea Masok Imbalan kepada Menteri.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Anti Dumping Indonesia

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
5	AD.04	Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Anti Dumping Indonesia
H. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA						
1	PI.00	Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
2	PI.01	Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Naskah yang berkaitan dengan Penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
3	PI.02	Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan. Naskah yang berkaitan dengan Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan Sektor Industri, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
4	PI.03	Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan Naskah yang berkaitan dengan Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan kepada Menteri Perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
5	PI.04	Pelaksanaan Rekomendasi Pengenaan Tindakan Pengamanan Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan rekomendasi pengenaan tindakan pengamanan kepada Menteri Perdagangan.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

td.

AGUS SUPARMANTO